

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KEPOLISIAN RESOR
DALAM PENERTIBAN TAMBANG TIMAH ILEGAL
DI KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Indira Sylvi Umari
NPP 32.0306

Asal Pendaftaran Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail : indirasylvi06@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. H. Mu'min Ma'ruf, S.H., M.Si

ABSTRACT

Background : Illegal tin mining activities in West Bangka Regency have caused environmental degradation, social conflict, and public disorder. Despite various enforcement efforts, illegal mining remains rampant, indicating a significant gap between policy implementation and actual enforcement on the ground. These gaps include weak inter-agency coordination, limited resources, and the absence of an inclusive approach toward communities whose livelihoods depend on illegal mining.

Purpose : This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the West Bangka Resort Police (Polres) in the enforcement of illegal mining regulations.

Methods : A descriptive qualitative approach was employed, using data collection techniques such as observation, interviews with 7 key informants (consisting of Satpol PP officials, police officers, and community members), as well as official documents from the West Bangka Regency Government.

Result : The findings indicate that synergy between institutions is formed through joint operations conducted several times during 2024. However, its effectiveness is hindered by several factors. First, in terms of communication, coordination meetings are conducted regularly through *Forkopimda* meetings, supported by aligned perceptions based on applicable regulations, as revealed in interviews with the Head of Satpol PP. Second, in terms of coordination, roles are implemented in accordance with a Memorandum of Understanding (MoU), yet deficiencies remain in public participation, as highlighted in community interviews.

Conclusion : The study concludes that while synergy between Satpol PP and the West Bangka Police has been established, it remains suboptimal due to a lack of integrated communication, technical coordination challenges, and limited community collaboration. Therefore, it is recommended that the local government strengthen cross-sectoral synergy, enhance public outreach on the environmental impacts of illegal mining, and develop economic alternatives such as labor-intensive programs or SME empowerment. This approach aligns with Najiyati's

theory of synergy, which emphasizes the integration of communication, coordination, and collaboration as the foundation for effective and sustainable policy enforcement.

Keywords: Illegal Tin Mining, Enforcement, Institutional Synergy

ABSTRAK

Latar Belakang : Aktivitas pertambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka Barat telah menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta mengganggu ketertiban umum. Meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan, penambangan ilegal masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan penertiban dan pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan tersebut mencakup lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan sumber daya, serta belum adanya pendekatan inklusif terhadap masyarakat yang bergantung pada tambang ilegal untuk penghidupan. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) Bangka Barat dalam penertiban tambang ilegal. **Metode :** Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap 7 informan kunci (terdiri dari pejabat Satpol PP, anggota Polres, dan masyarakat) serta dokumen dari Pemkab Bangka Barat. **Hasil penelitian :** Hasil menunjukkan bahwa sinergitas antar-lembaga terbentuk melalui pelaksanaan operasi gabungan yang dilakukan beberapa kali pada tahun 2024. Namun, efektivitas pelaksanaannya terkendala oleh beberapa faktor. Pertama, dari sisi komunikasi, rapat yang dilakukan dalam bentuk rapat forkpinma yang dilakukan secara rutin berdasarkan wawancara pada Kasatpol PP dan persepsi yang sama dengan berdasarkan pada regulasi yang mengatur. Kedua, dari dimensi koordinasi, pelaksanaan peran yang sudah sesuai serta didasari oleh teknis dalam bentuk MoU, namun masih terdapat beberapa kekurangan pada partisipasi berdasarkan wawancara pada masyarakat. **Kesimpulan :** Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Polres Bangka Barat telah terbentuk, namun belum optimal karena kurangnya komunikasi terpadu, lemahnya koordinasi teknis, serta rendahnya kolaborasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan sosialisasi terkait dampak lingkungan tambang ilegal, serta mengembangkan alternatif ekonomi seperti program padat karya atau pemberdayaan UMKM. Pendekatan ini sejalan dengan dimensi sinergitas Najiyati yang menekankan pentingnya integrasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sebagai landasan keberhasilan penegakan kebijakan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Tambang Timah Ilegal, Penertiban, Sinergitas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya mineral yang signifikan adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Daerah ini dikenal dengan hasil tambang timahnya yang telah menjadi salah satu komoditas utama sejak lama. Namun, di balik potensi ekonominya, kegiatan penambangan timah, khususnya yang dilakukan secara ilegal, menimbulkan sejumlah persoalan serius. (Dwi. H, Darwance, 2018). Kegiatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi juga berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan tata ruang wilayah. Dampak tersebut antara lain berupa rusaknya struktur tanah, pencemaran air, degradasi ekosistem, hingga timbulnya kubangan bekas tambang yang berbahaya bagi masyarakat sekitar terutama di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat menjadi salah satu titik yang rawan terhadap praktik pertambangan timah ilegal. (P et al., 2022). Penambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka Barat, terutama di Kecamatan Muntok, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk rusaknya struktur tanah dan pencemaran air yang memengaruhi ekosistem dan masyarakat sekitar. (Putri et al., 2023). Berdasarkan laporan Kepolisian Resor Bangka Barat, ditemukan beberapa kasus penambangan tanpa izin yang dilakukan secara berulang dan melibatkan peralatan modern namun tanpa prosedur yang sah. Kegiatan ini berlangsung di lokasi-lokasi terlarang seperti kawasan hutan lindung, daerah resapan air, dan bahkan area pemukiman penduduk.

Tabel 1. 1
LAPORAN KASUS PERKARA PENAMBANGAN TANPA IZIN

N O	PERKAR A	LAPORAN POLISI	KEJADIAN PERKARA	PASAL
1.	Penamban gan tanpa izin	LP/A/14/IX /2024/SPKT .SATRESK RIM/POLR ES BANGKA BARAT/PO LDA	Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib Anggota Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Bangka Barat mendapatkan Informasi dari Tim Tahura Menumbing tentang	158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

BANGKA adanya kegiatan diubah dengan
 BELITUNG Penambangan ilegal di Undang-undang
 Dusun Jungku Desa Air nomor 06 tahun 2023
 Putih Kec. Mentok Kab. tentang Cipta kerja
 Bangka Barat,
 Selanjutnya sekira
 pukul 13.00 Wib
 Anggota Kepolisian
 Polres Bangka Barat
 yang dipimpin langsung
 Kabag Ops Polres
 Bangka Barat Kopol
 SURTAN SITORUS,
 S.H bersama Satpol PP
 Kab. Bangka Barat
 langsung melakukan
 Penyelidikan dan
 selanjutnya Rombongan
 menelusuri di Dusun
 Jungku Desa Air Putih
 Kec. Mentok Kab.
 Bangka Barat.

2. Penamban LP/A/14/IX Pada hari Sabtu tanggal 158 Jo Pasal 35
 gan tanpa /2024/SPKT 8 Juni 2024 sekira pukul Undang-undang
 izin .SATRESK 09.30 WIB, bertempat Nomor 3 tahun 2020
 RIM/POLR di Pantai Selindung tentang perubahan
 ES Desa Air Belo Kec. atas Undang-undang
 BANGKA Mentok Kab. Bangka Nomor 4 tahun 2009
 BARAT/PO Barat. tentang Pertambangan
 LDA Mineral dan Batubara
 BANGKA sebagaimana telah
 BELITUNG diubah dengan
 Undang-undang
 nomor 06 tahun 2023
 tentang Cipta kerja

3. Penamban LP/A/12/VI Pada hari Rabu tanggal 158 Jo Pasal 35
 gan tanpa I/2024/SPK 17 Juli 2024 sekira Undang-undang
 izin T.SATRES pukul 15.00 Wib Nomor 3 tahun 2020
 KRIM/POL anggota Gabungan Ops tentang perubahan
 RES Peti menumbing 2024 atas Undang-undang
 BANGKA polres Bangka Barat Nomor 4 tahun 2009

BARAT/PO LDA BELITUNG , TANGGAL 17 JULI 2024	mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktivitas penambangan pasir timah jenis Dompeng di Wilayah Desa Air Putih Kec.Mentok Kab.Bangka Barat.	tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta kerja
--	---	---

Sumber : Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reskrim Kepolisian Resor Bangka Barat 2024

Kasus ini tidak hanya mengindikasikan lemahnya pengawasan, tetapi juga menunjukkan perlunya strategi yang lebih komprehensif dalam penanggulangan tambang ilegal. Timah sebagai sumber daya strategis dari 1998 hingga 2009 menyebabkan peningkatan signifikan dalam penambangan ilegal, yang mengakibatkan degradasi lingkungan, konflik sosial, dan kecelakaan kerja. (Derita Prapti Rahyu, Muhammad Rustamaji, Faisal S.H., M.H., 2024). Untuk menanggulangi persoalan ini, pemerintah daerah melakukan penertiban melalui sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres). Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memiliki kewenangan menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum, sementara Polres, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas memelihara keamanan dan menegakkan hukum. Dalam pelaksanaan tugas untuk menegakkan aturan Satpol PP dapat bekerja sama dengan Kepolisian agar pelanggaran tersebut dapat diproses sesuai dengan sanksinya. (Suhendi, 2019). Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. (Supriatna, 2020). Penegakan hukum yang responsif terhadap tambang timah ilegal dalam mencegah tambang timah ilegal serta diperlukan keterlibatannya pihak yang berkepentingan. (Redi, 2023). Pada kasus diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap penambangan timah ilegal, serta implementasi praktik penambangan yang lebih ramah lingkungan. (Hambali et al., 2024). Penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal di Bangka Belitung masih menghadapi tantangan besar, di mana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak berwenang sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap lingkungan. Meskipun berbagai bentuk penertiban telah dilakukan, efektivitasnya masih terbatas. Banyak aktivitas penambangan ilegal yang kembali muncul, menandakan bahwa penegakan hukum belum memberikan efek jera yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi antara Satpol PP dan Polres serta pendekatan yang lebih strategis, tidak hanya berupa tindakan represif, tetapi juga preventif dan edukatif kepada masyarakat. Penegakan hukum yang efektif dalam penertiban aktivitas ilegal, seperti penambangan timah, membutuhkan koordinasi yang solid antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Sinergi

memiliki banyak bagian yang berkumpul menjadi satu, melakukan kegiatan dengan prinsip dan tujuan yang sama. (Faiza, 2023). Penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi dan menganalisis sinergi antara kedua lembaga tersebut dalam rangka menciptakan kondisi pertambangan yang aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Harapannya, dengan kerja sama yang solid dan berkelanjutan antara lembaga penegak hukum serta dukungan regulasi yang jelas, permasalahan pertambangan timah ilegal di Kecamatan Muntok dan wilayah sekitarnya dapat diminimalkan demi menjaga kelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

1.2. Kesenjangan Masalah

Kesenjangan masalah terletak pada penertiban yang dilakukan terhadap tambang timah ilegal, keberlanjutan kegiatan penambangan masih terjadi karena berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pelaksanaan SOP, serta resistensi dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tambang ilegal. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat yang berkaitan pengelolaan pertambangan mineral masih memiliki kelemahan, baik dari segi pengawasan maupun dalam penindakan terhadap pelanggaran.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan pengkajian penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan. Dengan adanya penelitian sebelumnya, peneliti dapat membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya serta memastikan tidak ada kesamaan. Kajian terhadap penelitian terdahulu menjadi landasan penting untuk memahami konsep sinergitas antarinstansi dalam penegakan hukum. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek koordinasi dan kinerja instansi dalam penertiban tambang ilegal serta sinergitas antar-lembaga pemerintahan. Pertama-tama, penelitian oleh Joko Pramono dan Wulan Kinasih (2019) menyoroti sinergitas antar-stakeholder dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Gilingan, Surakarta, yang menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi menjadi faktor kunci keberhasilan. Dalam kajian ini juga menyoroti bagaimana komunikasi dan koordinasi menjadi faktor kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Gilingan, Surakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergitas yang efektif memerlukan kesepahaman antaraktor dalam membentuk strategi penegakan hukum. Kajian oleh Gina Putri Amana (2022) mengenai kinerja Satpol PP dalam penertiban tambang timah ilegal di Pangkal Pinang menyoroti hambatan dalam pelaksanaan tugas seperti minimnya responsivitas dan keterbatasan sumber daya manusia. Kinerja Satpol PP di Pangkal Pinang mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan tugas, seperti minimnya responsivitas dan keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini relevan dengan tantangan yang dihadapi dalam penertiban tambang ilegal di Bangka Barat Penelitian

lainnya dari Bintang Praka Perdana (2022) mengulas sinergi antara Satpol PP dan Kepolisian dalam menjaga ketertiban di Kabupaten Bintan, menekankan strategi yang digunakan untuk mengurangi pelanggaran di Kabupaten Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sinergitas telah terbentuk, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Selain itu, Rizky Ristiandy dan Eko Purnomo (2023) dalam analisis aktor pada aktivitas penambangan timah ilegal di Belitung Timur mengungkap bagaimana keterlibatan berbagai pihak berkontribusi pada berlanjutnya praktik tambang ilegal di Belitung Timur. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan multi-stakeholder dalam penegakan hukum. Terakhir, jurnal Sinergitas Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Korupsi Kajian oleh Fauzul Masyhudi (2023) yang membahas mengenai sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas sinergitas bergantung pada koordinasi yang jelas serta integrasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan penegakan hukum.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kebaruan ilmiah dalam kajian sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor dalam penertiban tambang timah ilegal di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Penelitian ini ditinjau dari aspek GAP, belum banyak mengkaji secara spesifik sinergi dua institusi penegak hukum yaitu Satpol PP dan Polres dalam konteks penertiban tambang timah ilegal yang tidak hanya fokus pada aspek hukum atau kebijakan saja melainkan juga mengintegrasikan aspek komunikasi, koordinasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas secara holistik. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek teknis penegakan hukum atau dampak lingkungan tanpa melihat secara mendalam proses interaksi dan kolaborasi antar lembaga secara menyeluruh. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek hukum dan kewenangan masing-masing instansi, penelitian ini mengidentifikasi koordinasi antar-lembaga yang berperan dalam efektivitas penegakan hukum dan pengendalian praktik tambang ilegal. Selain itu, penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja sama antar-instansi, seperti hambatan struktural dalam koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta resistensi sosial akibat ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap tambang ilegal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan model sinergitas yang berdasarkan kebijakan dan operasional yang dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif sosial dalam analisis penegakan hukum, mengulas mengenai masyarakat merespons kebijakan penertiban dan bagaimana pemerintah dapat menyiapkan strategi mitigasi terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan. Selain sebagai referensi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan mekanisme penegakan

hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi di daerah pertambangan. Dengan landasan teoretis yang kuat dan pendekatan multidimensi, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya literatur ilmiah serta memperkuat praktik kebijakan berbasis sinergitas dalam penertiban tambang ilegal di Indonesia.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas yang dijalankan kedua instansi dalam penertiban tambang ilegal di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) dalam penertiban tambang timah ilegal di Kabupaten Bangka Barat. (Abdussamad, 2021). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, khususnya dinamika komunikasi, koordinasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan secara kontekstual dan holistik. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian dapat mengeksplorasi proses dan interaksi antarinstansi secara detail. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang memberikan perspektif holistik terhadap interaksi dan kerja sama antara kedua institusi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif berdasarkan peran dan keterlibatannya langsung dalam proses penertiban tambang timah ilegal. Informan kunci terdiri dari pejabat dan personel dari Satpol PP dan Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat, karena mereka adalah pelaku utama dalam implementasi kebijakan dan operasi penertiban. Selain itu, masyarakat terdampak tambang ilegal juga dijadikan informan untuk memperoleh perspektif dari pihak yang merasakan langsung dampak sosial dan lingkungan, serta untuk memahami respon masyarakat terhadap penertiban. Informan kunci dipilih dengan alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang mendalam terkait tugas dan peran masing-masing lembaga dalam upaya penertiban. Observasi dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif, di mana peneliti mengamati langsung kegiatan penertiban, pertemuan koordinasi, serta pola komunikasi antara aktor-aktor yang terlibat. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yaitu Satpol PP, Kepolisian Resor, dan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas tambang ilegal, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran masing-masing instansi, tantangan yang dihadapi, dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai

dokumen resmi seperti peraturan daerah, surat keputusan, berita acara penertiban, serta laporan polisi terkait kasus tambang ilegal yang berfungsi sebagai bahan validasi terhadap data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, narasi, serta kutipan hasil wawancara untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang temuan penelitian. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data secara induktif, memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang sinergitas Satpol PP dan Kepolisian Resor dalam penertiban tambang timah ilegal. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola interaksi antarinstansi, mengungkap tantangan koordinasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penertiban tambang ilegal di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah dengan aktivitas tambang timah ilegal yang cukup signifikan dan menjadi fokus penertiban oleh Satpol PP dan Polres. Penelitian berlangsung dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor dalam Penertiban Tambang Timah Ilegal di Kabupaten Bangka Barat

3.1.1 Komunikasi

Perilaku komunikasi pribadi seorang individu merupakan sebuah penjabaran kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem yang mengatur. (Hasan, 2020). Komunikasi mencakup komunikasi pribadi dan komunikasi sosial individu yang meliputi host communication competence dan keterlibatannya dengan lingkungan tuan rumah melalui partisipasi dalam kegiatan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa tuan rumah. (Mogot et al., 2019). Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) dalam penertiban tambang timah ilegal di Kabupaten Bangka Barat diawali melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur dan berkesinambungan. Kombinasi struktur bahasa yang beragam mempengaruhi efektivitas komunikasi persuasif. (Khrumchenko, 2023). Komunikasi ini diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin melalui forum yustisi yang melibatkan unsur Forkopimda. Rapat tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi, menyusun strategi bersama, dan menetapkan sasaran operasi penertiban. Satpol PP dan Polres juga membangun komunikasi informal di luar forum resmi sebagai bentuk sinergi lapangan yang fleksibel dalam merespons dinamika kegiatan pertambangan ilegal. Selain itu, terbentuknya komitmen antara kedua instansi menjadi

dasar dalam memperkuat komunikasi. Komitmen tersebut lahir dari pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga tercipta kesamaan tujuan dalam menjaga ketertiban wilayah dari praktik pertambangan tanpa izin. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia. Departemen Kehakiman, 1995). Adanya kepemimpinan yang transformasional meningkatkan komunikasi terbuka dan kolaborasi antar anggota tim. (Agus, Sutisna. Aah, Khoriah. Juhartono. Efrita, 2024). Strategi komunikasi ini diperkuat oleh pendekatan pre-emptif dari Polres melalui kegiatan sosialisasi, kemudian ditindaklanjuti dengan langkah preventif seperti patroli dan pengawasan, serta pendekatan represif berupa penindakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal. Sinergi komunikasi yang terbangun dengan baik menjadi elemen krusial dalam memperkuat efektivitas tindakan penertiban.

3.1.2 Koordinasi

Menurut Erliana dan Eviany dalam (Soerya Putri, 2016) bahwa koordinasi menjamin kelancaran mekanisme pelaksanaan teknis kerja dari berbagai komponen organisasi, serta mengarahkan dan menyatukan kegiatan kerja organisasi. Koordinasi antara Satpol PP dan Polres dalam penertiban tambang timah ilegal dilakukan secara terpadu melalui pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang proporsional. Koordinasi dan integrasi dibutuhkan antara lembaga terkait dalam melakukan sosialisasi dan penegakan hukum yang efektif. (Harinda et al., 2021). Dalam hal koordinasi diperlukan adanya pendekatan yang berbasis etika ekosentris yaitu sebuah pendekatan dalam etika lingkungan yang menempatkan alam dan seluruh ekosistem sebagai pusat pertimbangan moral, bukan hanya manusia dalam penertiban tambang ilegal. (Haryadi et al., 2023). Satpol PP berperan sebagai penegak peraturan daerah yang menangani aspek administratif dan pelanggaran perda, sedangkan Polres bertugas menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Minerba serta KUHP terhadap tindakan pidana dalam pertambangan. Koordinasi diperlukan antarkedua lembaga untuk menanggulangi aktivitas pertambangan ilegal dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. (Estikomah, 2019). Kedua lembaga ini menyusun petunjuk teknis pelaksanaan melalui perjanjian kerja sama (MoU) serta nota kesepahaman guna memperjelas wewenang, alur kerja, dan prosedur operasional di lapangan. Dalam pelaksanaannya, dibentuk matriks pembagian tugas yang digunakan sebagai pedoman dalam operasi gabungan. Kegiatan koordinatif ini juga ditunjukkan melalui respons cepat atas laporan masyarakat maupun hasil temuan lapangan, di mana kedua institusi saling berperan sesuai porsi tugasnya. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa munculnya kembali aktivitas tambang ilegal pasca penertiban. Hal ini mencerminkan bahwa efektivitas penertiban masih menghadapi tantangan, sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi, keberlanjutan operasi, serta penguatan mekanisme penindakan hukum agar tujuan dari penegakan hukum dan perda dapat tercapai secara optimal.

3.2. Faktor yang Mempengaruhi Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor dalam Melakukan Penertiban Tambang Timah Ilegal di Kabupaten Bangka Barat

Penambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka Barat merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan lintas sektoral. Dalam konteks ini, sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) menjadi kunci dalam upaya penertiban. Berdasarkan teori sinergitas Najiyati dan Rahmat, sinergi antar lembaga dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, serta mekanisme kolaborasi. Faktor internal meliputi kejelasan kewenangan, komitmen pimpinan, dan kapasitas serta kompetensi sumber daya manusia. Faktor internal memiliki dampak signifikan terhadap kinerja secara keseluruhan. (Ahmed et al., 2018). Faktor eksternal mencakup dukungan politik dan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta karakteristik geografis wilayah. Sementara itu, dari aspek mekanisme kolaborasi, keberadaan sistem informasi terpadu, forum koordinasi yang rutin dan efektif, serta standar operasional prosedur (SOP) bersama menjadi instrumen penting dalam menunjang pelaksanaan tugas secara terpadu. Perencanaan SOP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan. (Kasiani et al., 2024). Dengan mengelola ketiga faktor tersebut secara optimal, sinergitas antara Satpol PP dan Polres dapat ditingkatkan sehingga pelaksanaan penertiban tambang timah ilegal berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) dalam penertiban tambang timah ilegal di Kabupaten Bangka Barat sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi sebagai pilar utama keberhasilan penertiban. Sinergi tersebut terbentuk melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur, seperti forum yustisi, serta komunikasi informal di luar forum resmi, yang mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi kedua lembaga dalam merespons dinamika lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Joko Pramono dan Wulan Kinasih (2019) yang menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Gilingan, Surakarta, sangat ditentukan oleh komunikasi dan koordinasi antaraktor. (Joko Pramono, 2019). Kesepahaman dan sinergi strategis antar lembaga menjadi faktor kunci dalam efektivitas kebijakan keamanan lokal. Temuan ini memperkuat hasil penelitian saat ini yang menunjukkan bahwa penyusunan strategi bersama serta komitmen antar lembaga melalui forum resmi dan komunikasi informal turut memengaruhi keberhasilan penertiban. Berbeda dengan hasil penelitian Gina Putri Amana (2022) yang mengidentifikasi hambatan utama pada kinerja Satpol PP di Pangkal Pinang berupa rendahnya responsivitas dan keterbatasan sumber daya manusia, penelitian ini menemukan bahwa meskipun keterbatasan sumber daya tetap menjadi tantangan, pendekatan kolaboratif dan sinergitas dengan Polres mampu

mengatasi sebagian hambatan, khususnya dalam pelaksanaan taktis di lapangan. (Amana, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan strategis antar kedua institusi di Kabupaten Bangka Barat justru meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Bintang Praka Perdana (2022) yang mengulas sinergi antara Satpol PP dan Kepolisian dalam menjaga ketertiban di Kabupaten Bintan, di mana peningkatan komunikasi dan koordinasi menjadi kunci penguatan sinergitas. (Perdana, 2023). Namun, dalam konteks Kabupaten Bangka Barat, penelitian ini menemukan adanya tahapan lebih lanjut berupa penyusunan petunjuk teknis melalui MoU dan nota kesepahaman yang memberikan pedoman jelas dalam pelaksanaan operasi gabungan, aspek yang belum secara rinci dibahas oleh Perdana. Sementara itu, berbeda dengan temuan Rizky Ristiandy dan Eko Purnomo (2023) yang mengungkap bahwa keberlanjutan praktik tambang ilegal di Belitung Timur diperkuat oleh keterlibatan berbagai aktor, termasuk aktor informal yang sulit dijangkau aparat, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas tambang ilegal masih muncul kembali setelah penertiban, sinergitas formal dan responsif antara Satpol PP dan Polres mampu memberikan kerangka kerja yang sistematis dan cepat dalam merespons situasi di lapangan. (Rizky & Eko, 2023). Hal ini menandakan bahwa struktur koordinasi yang jelas dapat meminimalkan pengaruh aktor nonformal yang sulit dikendalikan. Dalam konteks penertiban tambang timah ilegal, keberadaan sistem koordinasi, alur kerja, dan pembagian tugas yang tertulis dalam MoU menjadi landasan penting dalam pelaksanaan tugas di lapangan serta meningkatkan akuntabilitas. Namun demikian, temuan penelitian ini menolak anggapan bahwa sinergitas secara otomatis menjamin keberhasilan jangka panjang. Meskipun komunikasi dan koordinasi berjalan efektif, keberadaan aktivitas tambang ilegal yang muncul kembali mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif seperti pendekatan berkelanjutan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat sejumlah temuan sebelumnya, tetapi juga menegaskan pentingnya fleksibilitas komunikasi informal dan urgensi pendekatan kolaboratif yang berlandaskan etika lingkungan serta keberlanjutan sebagai upaya menyeluruh dalam menanggulangi aktivitas pertambangan ilegal secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

4.1. Simpulan Penelitian

Sinergi yang terjalin antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bangka Barat meskipun komunikasi dan koordinasi antara kedua instansi sudah berjalan optimal, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan meningkatkan partisipasi aktif kedua pihak, mengingat masih adanya tambang timah ilegal yang muncul kembali. Penertiban yang lebih efektif membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan dan strategi yang lebih matang. Faktor internal seperti pembagian kewenangan yang jelas, serta kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, menjadi

elemen penting dalam memastikan kelancaran operasi. Di sisi eksternal, dukungan politik dan pemahaman kondisi sosial masyarakat turut memengaruhi keberhasilan penertiban.

4.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari sebagai bagian dari evaluasi kritis terhadap hasil dan metode yang digunakan. Pertama, keterbatasan utama terletak pada cakupan wilayah penelitian yang hanya difokuskan pada Kecamatan Muntok, sehingga temuan dan analisis yang dihasilkan belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika penertiban tambang timah ilegal di wilayah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedua, karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka validitas data sangat bergantung pada keterbukaan informan serta kemampuan peneliti dalam menggali informasi melalui wawancara dan observasi, yang berpotensi menimbulkan bias subjektivitas. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses terhadap dokumen atau data resmi dari instansi terkait juga menjadi kendala dalam memperoleh data yang lebih komprehensif. Ketiga, pendekatan sinergitas yang dikaji dalam penelitian ini masih berfokus pada aspek komunikasi dan koordinasi antarinstansi, tanpa menggali lebih dalam mekanisme evaluasi pasca-operasi atau peran serta pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat, media, atau tokoh adat lokal yang sebenarnya berpengaruh dalam dinamika sosial masyarakat penambang. Oleh karena itu, untuk arah masa depan penelitian, disarankan agar studi lanjutan memperluas wilayah cakupan dan melibatkan lebih banyak aktor lintas sektor agar diperoleh gambaran sinergitas yang lebih kompleks dan menyeluruh. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau mixed-method juga dapat digunakan untuk mengukur secara objektif tingkat efektivitas sinergi antarinstansi serta pengaruhnya terhadap penurunan jumlah kasus tambang ilegal.

4.3. Arah Masa Depan Penelitian

Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi model kebijakan alternatif yang bersifat partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan, seperti pengembangan ekonomi hijau di wilayah pascatambang, keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan, serta inovasi teknologi pemetaan wilayah rawan tambang ilegal. Dengan demikian, arah penelitian ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan publik yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Bangka Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rappana (ed.)). CV. Syakir Media Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia. Departemen Kehakiman. (1995). *Analisa dan evaluasi hukum tentang prosedur perizinan pertambangan rakyat*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Dwi. H, Darwance, & R. D. . (2018). *Implementasi Tanggung Jawab Reklamasi Pertambangan Timah Di Pulau Belitung*. Jurnal, 12(2), 2083–2101.

Jurnal

- Agus, Sutisna. Aah, Khoriah. Juhartono. Efrita, N. (2024). *Transformational Leadership and Team Synergy in Improving Communication and Collaboration in Educational Settings*. 3, 657–667. <https://doi.org/10.56709/mesman.v3i3.551>
- Ahmed, A., Khuwaja, F. M., Brohi, N. A., & Othman, I. bin L. (2018). *Organizational Factors and Organizational Performance: A Resource-Based view and Social Exchange Theory Viewpoint*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(3), 594–614. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i3/3951>
- Amana, G. P. (2023). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penambangan Timah Ilegal di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Derita Prapti Rahyu, Muhammad Rustamaji, Faisal S.H., M.H., R. S. (2024). *Illegal Tin Mining, Policy Gaps and the Plight of Small-Scale Tin Miners in Indonesia*. *South East Asia Research*, Volume 32(4), 351–369. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.1100973>

- Estikomah, S. A. (2019). *Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah*. *Jurnal Bestuur*, 8(1). <http://repo.unida.gontor.ac.id/1988/%0Ahttp://repo.unida.gontor.ac.id/1988/2/4.A2.Des.2019-jurnal.bestur.S2.mandiri.pdf.pdf>
- Faiza, B. F. (2023). *Sinergi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi*. 5(April), 74–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3131>
- Hambali, R., Tae, L. S., Bachtiar, H., Denansyah, F. I., & Pamungkas, A. (2024). *River Sedimentation Due to Tin Mining Activities in Bangka Island*. *Journal of the Civil Engineering Forum*, 10(3), 315–326. <https://doi.org/10.22146/jcef.14749>
- Harinda, K. N., Purnawan, A., & Witasari, A. (2021). *The Law Enforcement of Environmental Law against Illegal Mining*. *Law Development Journal*, 3(4), 693. <https://doi.org/10.30659/ldj.3.4.693-699>
- Haryadi, D., Ibrahim, & Darwance. (2023). *Achieving ecocentric environmental ethics through progressive law enforcement against illegal tin mining in Belitung Island*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1267(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1267/1/012016>
- Hasan, E. (2020). *Perilaku Komunikasi Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Meningkatkan Profesionalitas Kerja Sebagai Abdi Negara Dan Abdi Masyarakat*. *Jurnal Tatapamong*, 1–8. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1140>
- Joko Pramono, W. K. (2019). *Sinergitas antar-Stakeholder dalam Penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*.
- Kasiani, K., Yusuf, M., Sarjana, I. M., Kencanawati, A. A. A. M., Marheni, L., & Masih, N. K. (2024). *Standard operating procedure planning product marketing with participatory ergonomic approach principles*. *International research journal of management, IT and social sciences*, 11(1), 39–48. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v11n1.2409>
- Khramchenko, D. S. (2023). *The Power Of Synergy In Discourse: Exploring Persuasive Language In English Mass Media*. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 13(2), 368–379. <https://doi.org/10.17509/ijal.v13i2.63068>
- Mogot, G. I., Warouw, D. M. D., & Waleleng, G. J. (2019). *Komunikasi Antar Budaya Mahasiswa Etnis Batak Dengan Mahasiswa Etnis Jawa Di Kampus Ipdn Sulut*. *Keywords in Qualitative Methods*, 1–13.
- P, W., Fahri, M., & Amir, N. (2022). *Environmental Law Enforcement in Illegal Mining Cases in Indonesia*. 1(1), 21–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7412256>

- Perdana, B. P. (2023). *Sinergitas Satpol PP dengan Kepolisian dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau*.
- Putri, A. F. J., Valensia, M. V., Purnama, R., & Manik, J. D. N. (2023). *Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, Dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Ilegal Di Kecamatan Mentok*. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), 4473–4481. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i10.1689>
- Redi, A. (2023). *Responsive Law Enforcement in Preventing and Eradicating Illegal Mining in Indonesia*. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(8), e1436. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1436>
- Rizky, R., & Eko, P. (2023). *Analisa Aktor dalam Aktivitas Penambangan Timah Ilegal di Belitung Timur*.
- Soerya Putri, A. R. (2016). *Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Penertiban Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Pabrik Di Kawasan Timur Kabupaten Bandung (Studi Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 1. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.144>
- Suhendi, D. (2019). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)*. *Jurnal Tatapamong*, 35–47. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>
- Supriatna, D. (2020). *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. *Jurnal Konstituen*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/doi.org/10.22146/jk.2341>